

# MODEL PENGUATAN MODAL SOSIAL (STUDI KASUS PADA KOMUNITAS NELAYAN DI PULAU MAKASAR KOTA BAU-BAU)

Tanzil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Universitas Halu Oleo,  
Kendari, [tanzilsosio@gmail.com](mailto:tanzilsosio@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendesain sebuah formulasi penguatan modal sosial pada komunitas nelayan di Pulau Makasar Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Upaya menggapai target utama penelitian, maka digunakan pendekatan kualitatif dalam konteks studi kasus, sehingga hasil studi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memformulasikan model penguatan modal sosial di tengah komunitas nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan peran aktif Pemerintah Kota Bau-Bau dalam proses pemberdayaan kepada masyarakat nelayan. Akan tetapi, pendekatan pemberdayaan yang digunakan cenderung parsial berupa pemberian permodalan dan pelatihan-pelatihan teknis saja. Kondisi ini menyebabkan perkembangan masyarakat nelayan di Pulau Makasar masih dalam skala *peasant fisher* yakni nelayan tradisional yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Produktifitas usaha nelayan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan subsisten keluarga dan kurang mendukung pemenuhan kebutuhan yang lebih luas. Karena itu, sebagai upaya menemukan model pemberdayaan, maka penelitian ini berupaya mengadopsi konsep modal sosial Woolcock (2001) yang dikaitkan dengan perkembangan masyarakat nelayan di pulau Makasar saat ini. Hasil formulasi dan pembahasannya akan dituangkan dalam tulisan ini.

Kata Kunci: Penguatan, Modal Sosial, Pemberdayaan dan Nelayan

## 1. Pendahuluan

Modernisasi pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, telah berlangsung dengan mengikuti lima tahapan strategis dimaksud dalam teori Rostow. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, juga telah menyelenggarakan proses pembangunan sejak kurun waktu Orde Baru, hingga pada kurun waktu Orde Reformasi. Semua paradigma dan pendekatan pembangunan yang digunakan selama ini, memang secara fisik-material diakui telah terjadi perubahan-perubahan yang mengagumkan di tingkat pedesaan. Akan tetapi, di balik kesuksesan dari lompatan kuantitatif (*quantum jump*) selama program “Revolusi Hijau” yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru (ORBA), tampak menghasilkan kesenjangan sosial ekonomi yang demikian menganga

lebar. Lebih jauh dari itu, juga menimbulkan proses degradasi sosial capital sebagai benteng terakhir yang dapat memutuskan apa yang seharusnya terjadi terhadap sumber daya di sekitarnya.

Potensi pranata, kelembagaan dan organisasi sosial petani dan nelayan sebagai komunitas pedesaan telah mengalami degradasi dan dekulturisasi serta berbagai dekonstruksi sosial lainnya, sehingga perlu ada upaya maksimal untuk mengedepankan penguatan kapasitas modal sosial melalui strategi *community development* berbasis komunitas, kultural, modal sosial dan spritualitas untuk melindungi keberadaan *indigenous institutions* dengan mengembangkan regulasi di tingkat nasional dan di tingkat daerah masing-masing (Ife dan Tesoriero, 2008; Hasim dan Remiswal, 2009; La Ola, 2011; Alfitri, 2011; Peribadi, 2015).

Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) yang dilakukan sejak tahun 2000 belum dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir. Menurut Kusnadi, disamping kurangnya pemihakan kebijakan pembangunan pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap kawasan dan masyarakat pesisir, semakin menjadikan masyarakat pesisir berada dalam kondisi ketidakberdayaan. Masyarakat ini semakin marginal sehingga kurang memiliki kemampuan mengembangkan kapasitas dirinya dan organisasi atau kelembagaan sosial yang dimiliki sebagai sarana aktualisasi dalam membangun wilayah (Kusnadi, 2006a).

Salah satu kelompok masyarakat nelayan yang masih mengalami masalah kemiskinan adalah warga komunitas nelayan di Pulau Makasar Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara, dimana dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dilakukan dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri dalam mengelola sumber daya laut. Secara umum permasalahan spesifik bagi komunitas nelayan di Pulau Makasar antara lain: (1) umumnya komunitas nelayan di Pulau Makasar masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten. Aktifitas penangkapan ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan belum

mendukung dalam hal pemenuhan kebutuhan yang lebih luas. (2) peralatan dan tehnologinya masih sederhana, sehingga jumlah produksi yang dihasilkan masih sangat terbatas.

Upaya mencari jalan keluar sebagaimana dihadapi komunitas nelayan di Pulau Makasar Kota Bau-Bau, nampaknya sangat penting untuk memperhatikan penguatan dimensi modal sosial. Penguatan terhadap dimensi modal sosial untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi komunitas nelayan, sekaligus berkaitan dengan perubahan paradigma pembangunan yang tidak hanya menekankan pada aspek yang bersifat material, namun juga menekankan pada aspek manusia. Menurut Kastasasmita (1997) modal sosial adalah sumber kekuatan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia.

Francis Fukuyama (2002) mengemukakan modal sosial menempati posisi yang sangat perifer sebagai faktor yang menentukan kualitas masyarakat. Upaya menanggulangi kemiskinan dan upaya membebaskan bangsa dari keterbelakangan senantiasa tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Hal ini erat kaitannya dengan dimensi modal sosial yang tidak diperhitungkan sebagai faktor penting dalam mempengaruhi efisiensi dan efektifitas kebijakan. Manusia ditempatkan sebagai subyek dalam penyelenggaraan pembangunan. Peranan modal sosial dalam desain pembangunan dapat dijumpai dalam penemuan Robert Bellah (1992) yang mengemukakan bahwa Jepang berhasil membangun kapitalisme karena telah berhasil menerapkan nilai-nilai tradisionalnya secara lebih rasional berdasarkan tuntutan agama Tokugawa. Peranan modal sosial dalam pembangunan juga diungkapkan Fukuyama (2002) yang menjelaskan bahwa warisan budaya masyarakat timur seperti; etika kerja, hidup hemat, sikap kekeluargaan dan gotong royong, ajaran agama dan sifat-sifat moral yang tertanam kuat dalam merupakan unsur-unsur strategis yang dapat melecut pembangunan masyarakat.

Penelitian menyangkut modal sosial dalam kaitannya dengan berbagai kegiatan kolektif masyarakat, telah banyak dilakukan, antara lain seperti analisis yang dilakukan Kosuke Takemura (2014) tentang modal sosial dan kesejahteraan masyarakat tani di Jepang. Penelitian Kara Stevens (2015) tentang penguatan jaringan sosial dan manfaat sosial ekonomi pada komunitas nelayan di laut Tenure Nikaragua. Penelitian Rosazman Hussin (2015) tentang program pengembangan kapasitas masyarakat nelayan di Sabah Malaysia, penelitian Javad (2012) mengenai pengaruh modal sosial pada pembangunan manusia di Iran, penelitian Gede Sedana (2013) tentang modal sosial dalam pengembangan agribisnis petani pada system Subak di Bali. Namun demikian studi tentang modal sosial dan budaya dalam masyarakat nelayan tradisional seperti halnya pada masyarakat nelayan di Pulau Makasar kota Bau-Bau belum banyak dilakukan sehingga penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekurangan berbagai studi tersebut, dengan tujuan utama penelitian yakni menganalisis model penguatan modal sosial pada komunitas nelayan di pulau Makasar Kota Bau Bau Sulawesi Tenggara.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Konsep Modal Sosial**

Berdasarkan definisi modal sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain; Coleman (1990), Putnam (1995), dan Fukuyama (1997), terdapat tiga unsur penting modal sosial yaitu kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial. Ketiga unsur modal sosial tersebut akan menggambarkan kategori struktural (jaringan) dan kognitif (kepercayaan dan norma).

Menurut Uphoff, dua kategori ini sangat mendasar untuk memahami modal sosial. Kategori struktural berkaitan dengan beragam bentuk organisasi sosial, khususnya peran-peran, aturan-aturan, preseden, dan prosedur-prosedur serta beragam jaringan-jaringan yang mendukung kerjasama yang memberikan manfaat bersama dari tindakan kolektif, dimana

aliran manfaat tersebut merupakan hasil dari modal sosial. Kategori kognitif datang dari proses mental yang menghasilkan gagasan/pemikiran yang diperkuat oleh budaya dan ideologi, norma-norma, nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang berkontribusi pada terciptanya perilaku kerjasama. Sederhananya, bentuk struktural dari modal sosial itu dapat diamati dan bersifat eksternal. Sebaliknya, bentuk modal sosial kognitif tidak nampak karena berada dalam pikiran. Namun demikian, keduanya mempengaruhi perilaku setiap orang, baik secara individual maupun dalam kelompok kecil dan besar (Syahra, 2003).

Coleman (1988) berpendapat bahwa pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya. Sekalipun sebenarnya terdapat banyak fungsi modal sosial tetapi ia mengatakan bahwa pada dasarnya semuanya memiliki dua unsur yang sama, yakni: pertama, (1) modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan (2) modal sosial member kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Ia memberi penekanan terhadap dua aspek dari struktur sosial yang sangat penting dalam memudahkan tercipta dan berkembangnya modal sosial dalam berbagai bentuk. Pertama, aspek dari struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. Kedua, adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Pentingnya kepercayaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi merupakan sorotan utama dalam kajian yang dilakukan Francis Fukuyama. Fukuyama (2001), mengatakan kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Bertolak dari karya pakar modal sosial sebelumnya, terutama James Coleman, Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Ia berpendapat modal sosial akan menjadi semakin kuat

apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. Karena itu ia berkesimpulan bahwa tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan.

## **2.2 Modal Sosial dan Pemberdayaan**

Prinsip utama dalam pemikiran modal sosial adalah bahwa kelompok-kelompok suatu masyarakat akan dapat maju dan berkembang dengan kekuatan sendiri apabila kelompok-kelompok masyarakat tersebut memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya kerjasama. Bertolak dari pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa modal sosial dapat diaplikasikan dalam upaya percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan tersebut sesuai kerangka berfikir Fukuyama (2002) menjelaskan bahwa warisan budaya masyarakat timur seperti; etika kerja, hidup hemat, sikap kekeluargaan dan gotong royong, ajaran agama dan sifat-sifat moral yang tertanam kuat merupakan unsur-unsur strategis yang dapat melecut pembangunan masyarakat. Demikian pula pendekatan pemberdayaan, Woolcock (2001) yang mengintegrasikan tiga tipe modal sosial, yaitu (1) tipe *social bounding*, yang bekerja pada kelompok-kelompok sosial (2) tipe *social bridging*, yang muncul dan berkembang dalam hubungan antar kelompok-kelompok sosial (3) tipe *social linking*, yang muncul dan berkembang dalam hubungan antara kelompok-kelompok sosial atau komunitas dengan pemerintah.

Pengertian *social bounding* adalah tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat dalam sistem sosial seperti halnya keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga lain yang masih satu etnik. *Social bridging* bisa berupa institusi

atau mekanisme. *Social bridging* merupakan ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ini bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada didalamnya sehingga memutuskan untuk membangun kekuatan dari luar dirinya. Wilayah kerja *social bridging* lebih luas dari *social bounding* karena dapat bekerja lintas kelompok etnik, maupun kelompok kepentingan. *Social linking* bisa berupa hubungan atau jaringan sosial. Hubungan sosial dikarakteristikan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat.

Pembahasan teori modal sosial Woolcock (2001) mengembangkan empat model jaringan sosial yang muncul dalam pendekatan pembangunan, yaitu dua model jaringan sosial yang bersifat *bottom up* dan dua model jaringan sosial yang bersifat *top down*. Dua model jaringan yang bersifat *bottom up* adalah integrasi (*integration*) dan jejaring (*linkage*). Integrasi menunjuk pada ikatan dalam komunitas itu sendiri sedangkan jejaring merujuk pada tingkat jangkauan komunitas berhubungan dengan keberadaan sumber daya sosial yang berasal dari luar komunitas. Dua model jaringan sosial yang bersifat *top down* yaitu integritas (*integrity*) dan sinergi (*synergy*). Integritas merujuk pada tingkat efisiensi dan efektifitas kelompok-kelompok sosial, koherensi, dan kapasitas kelompok-kelompok sosial, sedangkan sinergi merupakan jaringan eksternal kelompok-kelompok sosial di tingkat atas antara pemerintah dan lembaga keuangan yang merupakan jaringan kunci antara sektor privat dan publik.

### **3. Metodologi Penelitian**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami obyek penelitian secara mendalam. Desain metodologis yang digunakan yakni studi kasus (*case study*), yang berupaya mendesain model penguatan modal

sosial dan budaya dalam komunitas nelayan di pulau Makasar Kota Bau Bau. Untuk memperoleh temuan yang dapat dipercaya (valid), dalam penelitian ini menggunakan berbagai macam sumber data.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi atau dilakukan di Pulau Makasar. Pulau Makasar, adalah sebuah pulau kecil yang masuk di dalam kawasan pemerintahan Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara. Terpilihnya Pulau Makasar sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan masyarakat pulau Makasar sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu hidup sebagai nelayan dan masih bertahan sampai saat ini. Mereka memiliki kecintaan terhadap laut. Sebagai wujud kecintaan terhadap laut, mereka memiliki berbagai tradisi untuk menjaga kelestarian lingkungan laut.

### **3.3 Informan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan informan baik dari nelayan maupun dari tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Penentuan informan dapat dijelaskan dengan pertimbangan: Pertama, subyek yang mau menerima kehadiran peneliti secara lebih baik dibanding dengan yang lainnya. Kedua, kemampuan dan kemauan mereka untuk mengutarakan pengalaman masa lalu dan masa sekarang. Ketiga, siapa saja yang dianggap menarik, maka dapat dijadikan sebagai sumber informasi, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman khusus. Beberapa kalangan yang terpilih sebagai sumber informasi (*informan*) dalam proses pengumpulan data primer. Pertama, pada level individu, informan yang dipilih adalah nelayan atau masyarakat dimana nelayan sebagai pencaharian utama. Kedua, pada level organisasi (tingkat lokal), informan yang dipilih adalah Kepala dan Staf Desa/Kelurahan, Kepala dan Staf Kecamatan, Kepala dan Staf Kantor Perikanan. Ketiga, pada level tokoh masyarakat atau pemangku adat, informan yang dipilih adalah tokoh masyarakat atau pemangku adat.



### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pencarian data lapangan penekanannya lebih pada penemuan data-dataprimer, namun kebutuhan terhadap rangkaian data sekunder tetap diperlukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tambahan variasi data lapangan. Dengan demikian keberadaan data kuantitatif hanya untuk mendukung data-data kualitatif. Bagi kebanyakan peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif dituntut untuk memposisikan diri secara mandiri dan sekaligus mengoptimalkan perannya sebagai “instrumen utama” dalam penelitian. Artinya, peneliti kualitatif berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data lapangan, dan sekaligus melakukan analisis data, hingga menyajikan laporan hasil penelitian. Karena itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik (*varian*) pengumpulan data lapangan; observasi, wawancara, diskusi kelompok terbatas, dan studi kepustakaan.

### **3.5 Analisa Data**

Setelah seluruh data dikumpulkan baik berupa data primer maupun data sekunder, data diolah dan selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Pada dasarnya, dengan berpegang pada prinsip-prinsip kualitatif, maka proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian berlangsung, sebab pada saat pengumpulan data secara tidak langsung juga telah terjadi suatu proses analisis data.

## **4. Hasil Penelitian/Analisis**

### **4.1 Potret Penangkapan Ikan di Pulau Makasar**

Dari hasil observasi selama penelitian ini berlangsung, peneliti mendapatkan gambaran tentang variasi perahu penangkapan ikan, setidaknya ada 3 variasi perahu penangkapan ikan dalam usaha penangkapan ikan di Pulau Makasar, yakni : perahu berbentuk sampan, biasanya berukuran kecil (masyarakat setempat menamakannya dengan sebutan *Koli-koli* yang digerakkan oleh Dayung, kemudian perahu berbentuk *Ngkuru-ngkuru*

adalah semacam perahu yang terdiri dari 2 sampan dan dihubungkan dengan bambu-bambu satu sama lainnya, di tengahnya di pasangkan lampu petromaks. Selanjutnya bentuk perahu yang dilengkapi motor mini (masyarakat setempat menamakannya dengan sebutan Bagang) dengan alat tangkap pukat. Adapun jumlah setiap bentuk perahu tersebut dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 4.1: Bentuk-bentuk Perahu Penangkapan Ikan dalam Masyarakat Nelayan di Pulau Makasar**

No.	Bentuk Perahu	Unit		
		Kel. Sukanayo	Kel. Liwuto	Jumlah
1	<i>Koli-Koli</i>	161	120	281
2	<i>Ngkuru-ngkuru</i>	25	18	43
3	Bagang	4	5	11

Sumber : Data Lapangan Januari 2017

Sebelum penggunaan perahu motor berkembang, perahu dalam bentuk *Koli-koli*, digunakan secara luas oleh masyarakat Buton dan Muna untuk keperluan transportasi di laut. Sampai saat ini, perahu dalam bentuk *Koli-koli* masih banyak digunakan oleh nelayan di Pulau Makasar untuk menangkap ikan. Sebagai penggerak mereka menggunakan Dayung atau masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah *Bose*. Koli-koli terbuat dari kayu yang berukuran besar, cara membuatnya yakni dengan melubangi bagian tengah dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran kayu.



Gambar 4.1: Jenis Perahu Berbentuk *Koli-Koli*

Koli-koli biasa dioperasikan 2-3 orang dengan alat tangkap pancing dan jaring (pukat tasi). Jangkauan berlaut hanya disekitar pantai dengan waktu melaut biasa dilakukan pada pagi hari. Secara umum nelayan dengan alat tangkap *Koli-koli* masih digolongkan pada kategori nelayan yang berpendapatan rendah karena mereka menangkap ikan hanya mengandalkan kemampuan mendayung perahu (sampan) dan jangkauannyapun lebih banyak pada wilayah lepas pantai.

Selanjutnya penangkapan ikan menggunakan *Ngkuru-Ngkuru*. Dahulu, pengoperasian *Ngkuru-ngkuru*, juga menggunakan dayung namun saat ini pengoperasian *Ngkuru-ngkuru* oleh nelayan di Pulau Makasar telah menggunakan mesin tempel dan alat tangkap ikan menggunakan pukat. Dibanding dengan penggunaan *Koli-koli*, hasil tangkap dengan penggunaan *Ngkuru-ngkuru* lebih banyak karena wilayah jangkauannya lebih jauh. Disamping itu pulah sudah mengenal adanya pembagian kerja dan pembagian hasil usaha. Walaupun tidak dilakukan secara tegas namun dalam kelompok nelayan yang tergabung dalam usaha penangkapan ikan yang menggunakan *Ngkuru-ngkuru* telah menyadari adanya peran-peran yang harus dilakukan seperti pemeliharaan, pengoperasian mesin, penangkapan ikan dimana harus dilakukan dengan bekerjasama yang dilakukan secara bergilir.

Untuk mengoperasikan *Ngkuru-ngkuru* dibutuhkan 4-5 nelayan ditambah dengan seorang nakhoda yang pada umumnya seorang pemilik perahu. Hasil penangkapan biasa dijual di Pelelangan Ikan pasar Bau-Bau tetapi terkadang mereka juga menjual pada pedagang perantara. Pembagian hasil usaha pemilik perahu mendapat bagian yang lebih besar setelah mendapat tambahan dari perawatan perahu, biaya bahan bakar, pukat, lampu, mesin.



Gambar 4.2: Jenis Perahu Berbentuk *Ngkuru-ngkuru*

Penangkapan ikan dengan menggunakan bagang sudah dapat ditemukan dalam masyarakat nelayan di pulau Makasar walaupun masih dalam jumlah yang relatif kecil. Ukuran perahu lebih kurang 12-15 meter dengan lebar 1,5-2 meter. Untuk mengoperasikan bagang dibutuhkan 5-6 nelayan ditambah dengan seorang juragang. Biasanya, dalam sebuah bagang dilengkapi dengan ruangan yang terbuat dari papan yang berbentuk datar untuk menyimpan perlengkapan melaut, perbekalan dan ruang kemudi. Ruangan tersebut biasa juga digunakan oleh nelayan untuk melepaskan kelelahan setelah melakukan aktifitas dilaut.



Gambar 4.3: Jenis Perahu Berbentuk Bagang

Bila dibanding dengan perahu penangkapan ikan menggunakan *Ngkuru-ngkuru*, penangkapan dengan menggunakan Bagang menjadi lebih baik karena nelayan dapat menentukan daerah tangkapan yang lebih jauh. Hal ini dimungkinkan karena penangkapan jenis ini telah melakukan adaptasi teknologi pada penggunaan mesin yang memiliki kekuatan

yang lebih besar sehingga daya jangkau untuk menangkap ikan dapat dilakukan sesuai keinginan. Peran-peran yang harus dilakukan nelayan juga telah membutuhkan ketrampilan yang lebih baik misalnya peran untuk menjalankan mesin, memiliki pengetahuan pengoperasian alat tangkap sehingga diperoleh hasil yang memuaskan.

Sebagaimana halnya penangkapan ikan yang menggunakan *Ngkuru-ngkuru*, nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan bagang, juga telah menyepakati pembagian hasil tangkapan. Pemilik Bagang, mendapat bagian yang lebih besar setelah mendapat tambahan pendapatan sebagai pemilik fasilitas penangkapan. Namun kesepakatan tersebut tidak selamanya mengikat, terutama ketika hasil tangkapan sedikit. Biasanya pemilik perahu mengambil bagian yang lebih sedikit untuk memberi tambahan kepada nelayan yang lain agar kebutuhan rumah tangganya bisa terpenuhi.

#### **4.2 Keterlibatan Pemerintah Daerah**

Sebagaimana halnya nelayan di tanah air, kondisi nelayan di Pulau Makasar Kota Bau Bau masih didominasi nelayan tradisional. Untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam pengelolaan kawasan pesisir, pemerintah Kota Bau-Bau telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir. Salah satu yang dikembangkan adalah program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial dengan prinsip *to help them to help themselves*.

Pemerintah berupaya memfasilitasi nelayan agar tidak lagi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*sub-sistence*) namun mengembangkan usaha yang berorientasi pasar. Pemerintah telah berulang kali mengadakan pelatihan-pelatihan teknis dan pemberian bantuan modal. Disamping itu, pemerintah juga membangun fasilitas umum seperti pengadaan air bersih, tempat pertemuan, pengaspalan jalan dan pembangunan jembatan. Selain bantuan dari pemerintah ada juga bantuan dari berbagai pihak yang bertujuan

mengembangkan usaha nelayan. Seperti keterangan informan Sudin (58 tahun) bahwa bantuan yang diberikan kepada nelayan biasanya melalui mekanisme yang dikaji dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan dan seterusnya tingkat Kabupaten/Kota. Adapun bantuan yang pernah disalurkan kepada nelayan dapat dilihat dalam Tabel 2

**Tabel 4.2: Bantuan Pemerintah kepada Nelayan di Pulau Makasar 2016**

No	Jenis Fasilitas
1	Bodi 5 unit
2	Katinting 5 unit
3	Jaring Apung 1 unit

Sumber : Data Lapangan Januari 2017

Namun demikian, komunitas nelayan di pulau Makasar saat ini masih menghadapi beberapa kendala, yaitu; pengorganisasian sosial ekonomi umumnya masih berlangsung secara informal, lemahnya permodalan, peralatan dan teknologi yang sederhana, pendidikan formal nelayan yang relatif rendah, keterbatasan akses pemasaran, dan fasilitas penunjang yang terbatas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bau-Bau (Amiruddin) : “Saya kira memang itu kenyataan, tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama adalah fasilitas mereka baik itu alat tangkapnya, seperti Bodi, Karamba, itu masih persoalan dan masih jauh dari harapan kita sebenarnya. Bagaimana para nelayan dapat mengoptimalkan potensi kalau tidak ditopang dengan fasilitas dan sarana, itu sangat sulit. Kita akui bahwa mereka belum memiliki kehidupan ekonomi yang baik. Padahal mereka ini hidup dalam suatu lumbung kekayaan yang besar. Yaitu hasil laut dan potensi kekayaan dilaut tidak pernah berhenti setiap saat dan oleh karena itu terkait dengan kondisi ini saya kira ini bagian yang perlu kita sikapi dan bagian tanggung jawab dari pemerintah“(Wawancara, Amiruddin, Desember 2016)

Satria (2002) mengungkapkan bahwa kondisi ini bukanlah suatu yang independen, melainkan akibat pilihan kebijakan pembangunan masa lalu yang terlalu mengandalkan daratan dan mengabaikan lautan. Dampaknya, masyarakat pesisir kurang berkembang dan terus dalam posisi marjinal. Kemudian ketika pembangunan kelautan dan perikanan tengah marak-maraknya, ada sejumlah pertanyaan seputar efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan. Mengapa pertanyaan itu muncul. Tentu karena didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan masih kurang tepatnya berbagai pendekatan program pembangunan sehingga banyak program yang gagal. Selanjutnya, menurut Peribadi (2015) jika ternyata belum membuahkan hasil, maka dapat dipastikan pengguna (*user*) paradigma pembangunan tersebut cenderung tidak konsisten dalam menyelenggarakan siklus-siklus penanggulangan kemiskinan itu. Atau berlangsung hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tentu saja demikian, karena boleh jadi konteks epistemologinya sudah baik dan ontologisnya jelas dan tepat sasaran. Akan tetapi, pada tataran aksiologis sebagai implementasi pelaksanaan sebuah program, adalah sangat ditentukan oleh faktor kinerja dan mentalitas aktor yang terlibat langsung didalamnya.

#### **4.3 Penguatan Modal Sosial**

Mengacu pada pemikiran Woolcock dan dikaitkan dengan perkembangan usaha perikanan masyarakat nelayan di Pulau Makasar, dimana *lingking* yang tercipta pada masyarakat nelayan hanya menguat pada sebagian masyarakat nelayan. Disini dibutuhkan perubahan paradigma dalam pemberdayaan nelayan agar *lingking social kapital* dapat menguat pada seluruh elemen masyarakat nelayan.

Seperti dikatakan Satria (2002) bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan mungkin sudah sering dilakukan. Namun, semua itu tidak memberi perubahan yang cukup berarti. Hal ini mungkin disebabkan pendekatan yang dilakukan bersifat satu arah dengan membedakan

posisi pembela dan yang dibela. Dalam hal ini, nelayan sebagai pihak yang menghadapi kesulitan hanya diposisikan sebagai orang yang harus dibela, tetapi tidak sebagai orang yang dapat membela kepentingan mereka sendiri. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan tidak cukup hanya dengan melakukan advokasi, tetapi hendaknya melalui suatu proses pemberdayaan.

Oleh karena itu pemberdayaan harus didahului dengan pemahaman tentang karakteristik masyarakat nelayan. Salah satu ciri masyarakat nelayan di Pulau Makasar yakni kuatnya ikatan *patron klien* antara nelayan pekerja dengan nelayan pemilik perahu, namun yang perlu dipahami bahwa institusi ini tidak bersifat eksploitatif karena nelayan pemilik perahu selalu tampil sebagai bapak angkat bagi nelayan pekerja. Nelayan pemilik perahu kemudian mendorong nelayan pekerja melakukan mobilitas vertikal sehingga menjadi nelayan pemilik perahu.

Sehubungan dengan upaya mobilitas vertikal bagi nelayan, maka haruslah didukung dengan keberadaan institusi formal dan informal, yang mencakup; lembaga usaha, pemerintah, dan *civil society*. Untuk kepentingan nelayan di Pulau Makasar sangat penting untuk tetap melindungi dan mengakomodasi keberadaan institusi informal *patron klien* antara nelayan pemilik dan nelayan pekerja. Hal ini dilakukan karena institusi informal ini menjadi penopang utama bagi nelayan di Pulau Makasar dalam usaha perikanan selama ini. Keberadaan institusi informal tersebut dapat pula digunakan sebagai wadah untuk mengakses berbagai informasi sehubungan dengan aktifitas nelayan.

Masyarakat nelayan di Pulau Makasar dapat dipahami sebagai komunitas yang saling mendukung dan bergantung dari berbagai macam ikatan (keluarga, kerabat, budaya). Oleh sebab itu agar usaha nelayan tetap berkembang secara berkelanjutan, diperlukan upaya penguatan ikatan-ikatan sosial tersebut, kemudian diperlukan sinergi dengan kelembagaan dan organisasi sosial ekonomi baik secara horizontal maupun secara vertikal.

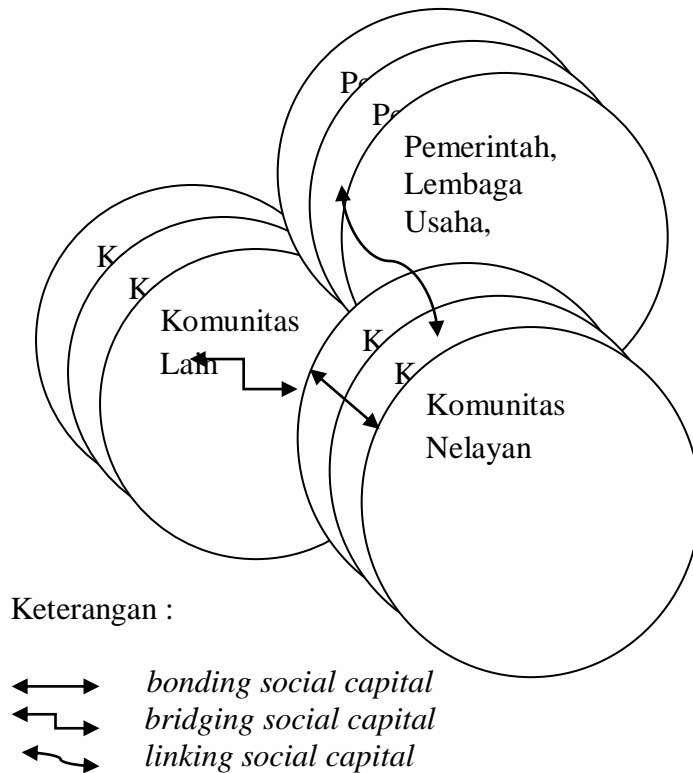


Untuk itu, agar nelayan di Pulau Makasar dapat mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini perlu adanya upaya mengintegrasikan *bonding social capital*, *bridging social capital* dan *linking social capital* seperti pemikiran yang diajukan Woolcock, dimana kita tidak lagi melihat nelayan sebagai kekuatan yang berdiri sendiri yang saling terpisah tetapi sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan kolektif yang saling bersinergis dengan kekuatan lainnya. Mengacu pada pemikiran Woolcock bahwa ketidakberdayaan masyarakat nelayan di Pulau Makasar karena daya dukung *bridging social capital* dan *linking social capital* terhadap *bonding social capital* yang belum maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan *bridging social capital* dan *linking social capital* yang mampu memfasilitasi *bonding social capital*.

Selanjutnya akan melahirkan model jaringan yang bersifat *bottom up* dan *top down*. Model jaringan sosial yang bersifat *bottom up* adalah jaringan sosial yang merujuk pada integrasi dalam komunitas masyarakat nelayan dan jejaring yang merujuk pada tingkat jangkauan komunitas nelayan berhubungan dengan keberadaan sumber daya sosial yang berasal dari luar komunitasnya. Model jaringan sosial yang bersifat *top down* yakni sinergi dengan kelompok-kelompok sosial di tingkat atas antara lain pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Model jaringan sosial yang merujuk pada penguatan modal sosial melalui integrasi dan sinergis *bonding social capital*, *bridging social capital* dan *linking social capital* dapat dilihat dalam bagan berikut:

**Bagan 3 : Model Penguatan modal sosial melalui sinergis *bonding social capital*, *bridging social capital* dan *linking social capital***



Model penguatan modal sosial yang dapat dikembangkan yakni mengkombinasi unsur-unsur informal misalnya kelembagaan adat, agama dalam komunitas nelayan maupun diluar komunitas nelayan (*bonding*/eksklusif dan *bridging*/inklusif) dan unsur formal misalnya lembaga usaha, pemerintah, dan lain-lain (*linking*).

Selanjutnya perlu mendorong solidaritas sosial dan kepercayaan kedalam seluruh komponen modal sosial dengan menanamkan nilai-nilai *pobhinci-bhinciki kuli*, yaitu nilai dan norma yang berakar dari falsafah orang Buton masa lalu yang masih dihayati dan diamalkan sepenuhnya oleh komunitas nelayan di Pulau Makasar saat ini.

Perkembangan selanjutnya, falsafah ini dijabarkan dalam empat perilaku dasar yakni, pertama, *po maa maasiaka* artinya kasih mengasihi satu sama yang lain atau hidup saling mengasihi terhadap sesama. Kedua, *po pia piara* artinya saling memelihara satu sama lain atau hidup saling memelihara jangan sampai teman atau orang lain terseret kejalan yang tidak benar. Ketiga, *po angka-angkata-ka* artinya saling menghormati satu sama lain. Keempat, *po*

*mae-maeka* artinya saling menjaga satu sama lain agar tidak berakibat malu kepada orang lain (La Ode, 1992).

Disamping itu pula model ini dapat dijadikan sebagai mekanisme pengendalian konflik-konflik sosial dalam masyarakat nelayan di pulau Makasar yang lahir akibat perbedaan-perbedaan kepentingan dalam masyarakat nelayan, sehingga nilai-nilai tradisional dan modern dapat diintegrasikan agar menjadi kekuatan dalam kemajuan ekonomi masyarakat nelayan di pulau Makasar.

## **5. Diskusi**

Temuan yang diperoleh sebagai diskusi teoritik dalam penelitian ini bahwa kondisi nelayan di Pulau Makasar masih dalam skala *peasant fisher* yakni nelayan tradisional yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Mengadopsi pemikiran Woolcock bahwa hal ini terjadi karena masyarakat nelayan di Pulau Makasar memiliki modal sosial yang tidak seimbang antara *bonding social capital*, *bridging social capital* dan *linking social capital*. *Social linking* belum dapat memfasilitasi kepentingan nelayan.

Kenyataan ini terjadi karena pilihan kebijakan pembangunan yang masih bernuansa *top down*. Implikasinya adalah implementasi pemberdayaan masyarakat nelayan di pulau Makasar cenderung tidak konsisten dalam menyelenggarakan siklus-siklus penanggulangan kemiskinan dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pendekatan pemberdayaan dengan memperhatikan aspek modal sosial dan budaya yang merupakan pergeseran pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) belum sepenuhnya diwujudkan dalam implementasi. Pendekatan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat nelayan masih bersifat parsial yang masih menitikberatkan pada aspek permodalan dan pelatihan-pelatihan teknis.

## **6. Kesimpulan**

Masyarakat nelayan di Pulau Makasar memiliki modal sosial yang tidak seimbang antara *bonding social capital*, *bridging social capital* dan *linking social capital*. Konsekwensinya adalah *social linking* belum dapat memfasilitasi kepentingan nelayan. Kondisi ketidakberdayaan ini masih terbuka untuk dikembangkan agar menjadi nelayan yang lebih berdaya dengan mendorong sinergitas antar capital sehingga nelayan mendapat relasi yang luas dan dapat memperkuat kerjasama ekonomi dengan pemilik modal yang saling menguntungkan.

### Daftar Pustaka

- Alfitri, 2011, *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bellah, Robert 1992. *The Good Society*. New York: Alfred A. Knopf Inc.
- Coleman, James S. (1990) *Foundations of Social Theory*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Social Capital and Development: The Coming Agenda*. SAIS Review 22.1 23-37
- Fukuyama, Francis (1995) *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Hasim dan Remiswal, 2009, *Community Development, Berbasis Ekosistem, Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat*, Diadit Media, Jakarta.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank, 2008, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, diterjemahkan dari buku *Community Development, Alternatives in on Age of Globalisation*, oleh Sastrawan Manullang, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- La Ola, Taane, 2011, *Modal Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Petani Jambu Mete (Studi Komparatif di Kabupaten Buton dan Muna)*, *Disertasi UNHAS*, Makassar.
- Kartasmita, G.1996. *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenal Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Korten, David C. 2006. *The Great Turning*. San Fransisco: Berret Koehler Publesher Inc. and Kumarian Press.
- Kusnadi, 2006a. *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: LkiS
- Muhammad, La Ode Sjamsul Qamar. 1992. *Drs. Haji La Ode Manarfa yang Saya Kenal*. Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Bau-Bau Buton.
- Peribadi,2015. *Reconstruction of Participatory Paradigm Based on ESQ Power, A Strategy of Poverty Overcoming in Kendari City, South East Sulawesi*, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany.
- Putnam, Robert D. 1995. "Bowling Alone: America,s Declining Social Capital"*Journal of Demokrasi*, 65-78.
- Syahra, Rusyidi. 2003. *Modal Sosial: Konsep dan Alikasi*” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Volume 5 No. 1